

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018**

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018

Jl. Ketindan No. 1 Lawang - Malang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan/Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah salah satu entitas akuntansi dari Kementerian Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Malang, 31 Desember 2018



Dr. drh. Kresno Suharto, MP
NIP. 19630807 199103 1 002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan	6
I Laporan Realisasi Anggaran.....	6
II Neraca	6
III Laporan Operasional	6
IV Laporan Perubahan Ekuitas	7
V Catatan atas Laporan Keuangan	7
A Penjelasan Umum	12
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	23
B.2 Belanja	24
B.3 Belanja Pegawai	26
B.4 Belanja Barang	26
B.5 Belanja Modal	28
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29
B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29
B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	30
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
C.1 Aset Lancar	31
C.1.1 Persediaan	31
C.2 Aset Tetap	31
C.2.1 Tanah.....	31
C.2.2 Peralatan dan Mesin	32
C.2.3 Gedung dan Bangunan	33
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	34
C.2.5 Aset Tetap Lainnya.....	35
C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	36
C.3 Piutang Jangka Panjang.....	36
C.4 Aset Lainnya.....	37

C.4.1	Aset Lain-lain	37
C.4.2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	37
C.5	Kewajiban Jangka Pendek	38
C.5.1	Utang Kepada Pihak Ketiga	38
C.6	Ekuitas	38
C.6.1	Ekuitas	38
D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	39
D.2	Beban Pegawai	40
D.3	Beban Persediaan	41
D.4	Beban Barang dan Jasa	42
D.5	Beban Pemeliharaan	43
D.6	Beban Perjalanan Dinas	44
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	45
D.8	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	46
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
E.1	Ekuitas Awal	48
E.2	Surplus/Defisit-LO	48
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar ..	48
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	48
E.4.1	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	48
E.4.2	Penyesuaian Nilai Aset	49
E.4.3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	49
E.5	Transaksi Antar Entitas	50
E.5.1	Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	50
E.5.2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	50
E.6	Ekuitas Akhir	51
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	52
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	52
F.2	Temuan dan Tindak Lanjut Atas Temuan BPK	52
F.3	Rekening Pemerintah	52
F.4	Pejabat Pengelola Keuangan	52
F.5	Transfer Masuk Tanah, Gedung dan Bangunan	53
F.6	Setoran Kemahalan Tahun 2017	53
F.7	Revisi DIPA	53

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Laporan Realisasi Anggaran	8
Tabel 2 : Neraca	9
Tabel 3 : Laporan Operasional	10
Tabel 4 : Laporan Perubahan Ekuitas	11
Tabel 5 : Penggolongan Kualitas Piutang	18
Tabel 6 : Masa Manfaat Aset	20
Tabel 7 : Kelompok Aset Tak Berwujud	21
Tabel 8 : Rincian Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi	23
Tabel 9 : Rincian estimasi dan Realisasi Pendapatan	24
Tabel 10 : Perbandingan realisasi Pendapatan	24
Tabel 11 : Rincian Pagu dan realisasi Belanja	25
Tabel 12 : Perbandingan Realisasi Belanja	25
Tabel 13 : Perbandingan Belanja Pegawai	26
Tabel 14 : Perbandingan Belanja Barang	27
Tabel 15 : Perbandingan Belanja Modal	28
Tabel 16 : Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29
Tabel 17 : Perbandingan Belanja Modal gedung dan Bangunan	30
Tabel 18 : Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	30
Tabel 19 : Perbandingan Persediaan	31
Tabel 20 : Mutasi Tanah	31
Tabel 21 : Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin	32
Tabel 22 : Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan	33
Tabel 23 : Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	35
Tabel 24 : Mutasi Aset Tetap Lainnya	36
Tabel 25 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	36
Tabel 26 : Mutasi Nilai Aset Lain-lain	37
Tabel 27 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	38
Tabel 28 : Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga	38
Tabel 29 : Perbandingan PNBPN Lainnya	39
Tabel 30 : Perbandingan Beban Pegawai	40
Tabel 31 : Perbandingan Beban Persediaan	42
Tabel 32 : Perbandingan Beban Barang dan Jasa	42
Tabel 33 : Perbandingan Beban Pemeliharaan	44
Tabel 34 : Perbandingan Beban Perjalanan Dinas	45

Tabel 35	:	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi	46
Tabel 36	:	Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	47
Tabel 37	:	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	49
Tabel 38	:	Rincian Selisih Revaluasi Aset	49
Tabel 39	:	Rincian Transaksi Antar Entitas	50
Tabel 40	:	Rincian Transfer Masuk	51
Tabel 41	:	Rekening Pemerintah	52

DAFTAR LAMPIRAN

UAKPA

- Lampiran I : Telaah Laporan Keuangan
- Lampiran II : Laporan Keuangan per 31 Desember 2018
- Lampiran III : Berita Acara Rekonsiliasi SAI dengan KPPN setempat Semester II Tahun 2018
- Lampiran IV : Memo Jurnal Penyesuaian

SIMAK BMN

- Lampiran V : Laporan Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2018
- Lampiran VI : Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara Semester II Tahun 2018
- Lampiran VII : Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Persediaan per 31 Desember 2018 dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Fisik
- Lampiran VIII : Rekapitulasi Belanja Modal Semester II Tahun 2018
- Lampiran IX : BAST BMN
- Lampiran X : Surat Keterangan/Keputusan Mengenai BMN

BENDAHARA PENGELUARAN

- Lampiran XI : Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas UAKPA dan Bendahara Pengeluaran
- Lampiran XII : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Periode Semester II Tahun 2018
- Lampiran XIII : SSPB Terkait Penyetoran Pengembalian Bendahara Pengeluaran

BENDAHARA PENERIMAAN

- Lampiran XIV : Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas UAKPA dan Bendahara Penerimaan
- Lampiran XV : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Periode Semester II Tahun 2018
- Lampiran XVI : SSPB terkait penyetoran Kas Di Bendahara Penerimaan (PNBP)

LAIN-LAIN

- Lampiran XVII : DIPA, Revisi DIPA dan POK Semester II Tahun 2018
- Lampiran XVIII : SP2D Sampai Dengan 31 Desember 2018
- Lampiran XIX : Persetujuan Kembali atas Pembukaan Rekening
- Lampiran XX : SK Penetapan Pejabat



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN**

Gedung D

Jalan Harsono RM Ragunan, Ps. Minggu-No.3
Jakarta 12550

Telp : 021-7815380

Fax : 021-7804257

BERITA ACARA KESEPAKATAN

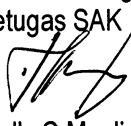
Nomor : /BPPSDMP/PUSAT/LK SM II/2018

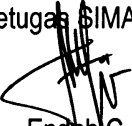
Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** telah diselenggarakan kesepakatan nilai Laporan Keuangan (LRA, LO, LPE dan Neraca) dan Laporan Barang Milik Negara antara Satuan Kerja **Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan** kode satker (**239654**) yang selanjutnya disebut **Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B)**, dengan **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, yang selanjutnya disebut **Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA/B E1)** Kementerian Pertanian.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) menyampaikan Laporan Keuangan (LRA, LO, LPE dan Neraca) dan Laporan Barang Milik Negara yang sudah ditandatangani oleh Petugas Satker dan Tim Verifikator sebagai bahan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan tingkat **Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA/B-E1)** dan **Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B)**, berupa **Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca Tahunan dan Laporan Barang Milik Negara**.

Selanjutnya Petugas SAI tingkat satker menyediakan data Catatan atas Laporan Keuangan dan Catatan Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SPM/SP2D yang disampaikan ke UAPPA-Eselon I yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum.

Hasil kesepakatan ini (terlampir) dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Tingkat Satker
Petugas SAK Petugas SIMAK BMN
 
(Lelly C. Maulid) (Ekowani A.)

Tim Verifikator
Petugas SAK Petugas SIMAK BMN
 
(Ramadan Aditya) (Endah C.)

Tim Reviu

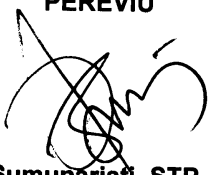
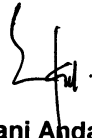
(Y C Sumunarjati, STP, MM)

Mengetahui

Penanggungjawab Kegiatan

(Khairul Rizal, SE, MM)

CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal			Disusun oleh/Tanggal	Y C Sumunarjati, STP, MM/22 Januari 2019
			Direviu oleh/Tanggal	Piter Simanjuntak, SE.Ak, M. S/22 Januari 2019
			Disetujui oleh/Tanggal	Ir. Mulyadi, M. S/22 Januari 2019
UAPA	018	Kementerian Pertanian		
UAPPA-E1	10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian		
UAPPA-W	0500	Jawa Timur		
UAKPA	239654	Balai Besar Peatihan Pegawai Pertanian Ketindang		
Uraian Catatan Hasil Reviu				
Penyelenggaraan Akuntansi				Indeks KKR
Penyajian LK:				
A. LRA				
Telah Sesuai				KKR LRA
B. LO				
Telah Sesuai				KKR LO
C. LPE				
Telah Sesuai				KKR LPE
D. Neraca				
Terdapat asset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan senilai Rp1.007.075.200,00, yang diusulkan ke Setjen tetapi belum keluar surat persetujuan penghapusannya.				KKR Neraca
E. CaLK				
-				KKR CaLK
Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui				
-				
PEREVIU			PETUGAS SAIBA	
				
Y C Sumunarjati, STP, MM			Lelly Cesarina Maulid	
			PETUGAS SIMAK BMN	
				
			Ekowani Andansari	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Malang, 31 Desember 2018

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian
Ketindan



Dr. drh. Kresno Suharto, MP *dr*
NIP. 19630807 199103 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp389.383.482,00 atau mencapai 129,45% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp300.808.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp20.633.757.943,00 atau mencapai 98,86% dari alokasi anggaran sebesar Rp20.871.674.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp45.918.847.290,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp10.000.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp45.905.620.135,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.227.155,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp22.424.012,00 dan Rp45.896.423.278,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp363.781.300,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp22.032.603.575,00

sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-21.668.822.275,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-9.277.577,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-21.678.099.852,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp21.997.254.145,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-21.678.099.852,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp11.103.864.798,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp34.473.404.187,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp45.896.423.278,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018			31 Desember 2017
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	300.808.000,00	389.383.482,00	129,45	302.984.800,00
Jumlah Pendapatan		300.808.000,00	389.383.482,00	129,45	302.984.800,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	6.131.725.000,00	5.933.077.007,00	96,76	6.041.646.057,00
Belanja Barang	B.4.	13.128.573.000,00	13.089.769.936,00	99,70	15.438.445.781,00
Belanja Modal	B.5.	1.611.376.000,00	1.610.911.000,00	99,97	1.152.713.000,00
Jumlah Belanja		20.871.674.000,00	20.633.757.943,00	98,86	22.632.804.838,00

II. NERACA

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	10.000.000,00	89.195.800,00
Jumlah Aset Lancar		10.000.000,00	89.195.800,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	13.890.000.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	16.531.177.574,00	16.155.172.671,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	27.318.879.615,00	19.415.958.280,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2.480.245.000,00	2.070.527.337,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	173.451.242,00	173.451.242,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6.	-13.460.903.303,00	-11.729.602.380,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6.	-828.679.627,00	-3.175.125.631,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6.	-198.550.366,00	-999.844.657,00
Jumlah Aset Tetap		45.905.620.135,00	21.910.536.862,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.4.1.	1.007.075.200,00	1.079.275.053,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.4.2.	-1.003.848.045,00	-1.000.446.715,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		0,00	-64.075.000,00
Jumlah Aset Lainnya		3.227.155,00	14.753.338,00
Jumlah Aset		45.918.847.290,00	22.014.486.000,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	22.424.012,00	17.231.855,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		22.424.012,00	17.231.855,00
Jumlah Kewajiban		22.424.012,00	17.231.855,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	45.896.423.278,00	21.997.254.145,00
Jumlah Ekuitas		45.896.423.278,00	21.997.254.145,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		45.918.847.290,00	22.014.486.000,00

III LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	363.781.300,00	301.429.800,00
JUMLAH PENDAPATAN		363.781.300,00	301.429.800,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.935.933.600,00	6.041.646.057,00
Beban Persediaan	D.3.	264.597.300,00	243.598.140,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	7.317.075.989,00	6.991.667.279,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	883.238.010,00	886.851.129,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	4.706.390.501,00	7.279.904.908,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	2.925.368.175,00	2.587.055.269,00
JUMLAH BEBAN		22.032.603.575,00	24.030.722.782,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		21.668.822.275,00	23.729.292.982,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	9.278.077,00	121.346.369,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	500,00	38.834.390,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	0,00	299.650,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-9.277.577,00	-82.811.629,00
SURPLUS/DEFISIT LO		21.678.099.852,00	23.812.104.611,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	E.1.	21.997.254.145,00	23.476.278.031,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-21.678.099.852,00	-23.812.104.611,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1.	-545.174.952,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.2.	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3.	11.649.039.750,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5.	34.473.404.187,00	22.333.080.725,00
EKUITAS AKHIR		45.896.423.278,00	21.997.254.145,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pertanian. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan memiliki visi menjadi lembaga pelatihan berkualitas untuk mewujudkan SDM pertanian yang professional dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan visi, BBPP Ketindan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan program pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing serta mengembangkan jejaring kerjasama dan kemitraan usaha komoditas pertanian melalui pelayanan pelatihan pertanian berkualitas dan konsultasi usaha tani yang prima;
2. Mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan sebagai bahan rekomendasi pimpinan dan melakukan pengendalian internal yang akurat, kredibel dan akuntabel;
3. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi dan berdaya saing sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI);
4. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) serta berdaya saing;
5. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ketenagaan pertanian untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian bioindustri menuju peningkatan dan kesejahteraan petani;
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi usaha tani;
7. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
8. Melakukan peningkatan intensitas kerjasama dan promosi terutama bagi instansi prospektif dan sudah pernah bekerja sama dengan pihak Ketindan.

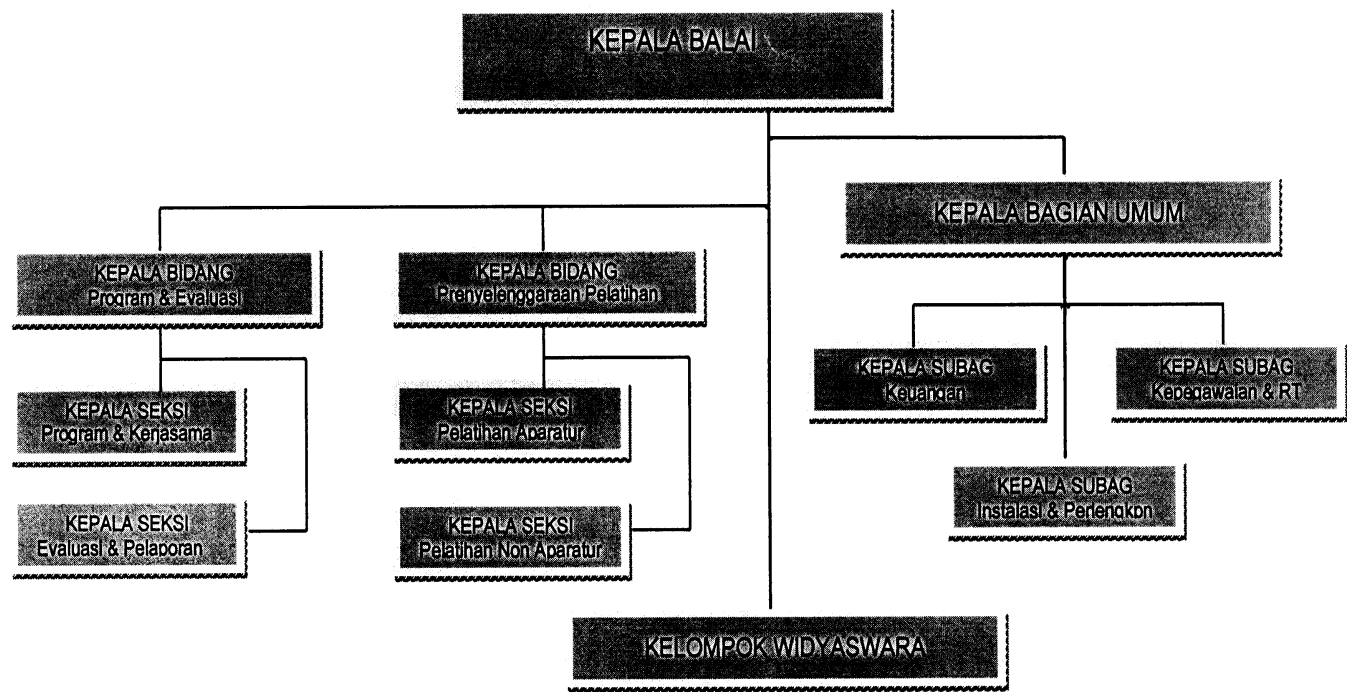
Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan BBPP Ketindan adalah:

1. Meningkatnya kualitas program pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing dengan penyediaan sistem informasi terintegrasi serta peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan pelatihan pertanian berkualitas dan konsultasi usaha tani yang prima
2. Meningkatnya kualitas dan efektivitas sistem pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian internal secara akurat, kredibel dan akuntabel
3. Meningkatnya kualitas teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi kerja sesuai Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI)
4. Meningkatnya kualitas teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI)
5. Meningkatnya kompetensi ketenagaan yang berdaya saing dan bermartabat;
6. Mengoptimalkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis;
7. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan telah menetapkan 4 (empat) program untuk periode Tahun Anggaran 2018 yang mengacu pada program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan Pemantapan Kelembagaan Pelatihan;
2. Peningkatan Profesionalisme Ketenagaan Pelatihan Pertanian;
3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pertanian;
4. Peningkatan Kualitas Program dan Kerjasama Pelatihan Pertanian.

Struktur Organisasi
Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan



A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan

Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(6) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	300.808.000,00	300.808.000,00
Jumlah Pendapatan	300.808.000,00	300.808.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.332.321.000,00	6.131.725.000,00
Belanja Barang Operasional	1.316.220.000,00	1.688.998.000,00
Belanja Barang Non Operasional	6.348.121.000,00	4.678.922.000,00
Belanja Barang Persediaan	182.400.000,00	185.750.000,00
Belanja Jasa	1.214.200.000,00	974.864.000,00
Belanja Pemeliharaan	712.838.000,00	890.436.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.120.887.000,00	4.709.603.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	24.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.094.000,00	341.650.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	846.551.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	423.175.000,00
Jumlah Belanja	21.490.081.000,00	20.871.674.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp389.383.482,00 atau mencapai 129,45% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp300.808.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	300.808.000,00	363.781.300,00	120,93
Pendapatan Lain-lain	0,00	25.602.182,00	0,00
Jumlah	300.808.000,00	389.383.482,00	129,45

Realisasi Pendapatan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 28,52% dibandingkan TA 2017. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	363.781.300,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa	0,00	262.150.000,00	-100,00
Pendapatan Lain-lain	25.602.182,00	1.555.000,00	1.546,44
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0,00	39.279.800,00	-100,00
Jumlah	389.383.482,00	302.984.800,00	28,52

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp20.633.757.943,00 atau 98,86% dari anggaran belanja sebesar Rp20.871.674.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2018

Uraian	2018		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.131.725.000,00	5.933.263.261,00	96,76
Belanja Barang	13.128.573.000,00	13.089.769.936,00	99,70
Belanja Modal	1.611.376.000,00	1.610.911.000,00	99,97
Total Belanja Kotor	20.871.674.000,00	20.633.944.197,00	98,86
Pengembalian Belanja		-186.254,00	0,00
Total Belanja	20.871.674.000,00	20.633.757.943,00	98,86

Dibandingkan dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar -8,83% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja pegawai mengalami penurunan disebabkan adanya beberapa orang pegawai yang telah pensiun
2. Belanja barang mengalami penurunan disebabkan oleh berkurangnya jumlah diklat. Pada tahun ini jumlah diklat sebanyak 103 angkatan, sedangkan pada tahun sebelumnya sebanyak 138 angkatan.
3. Belanja modal mengalami kenaikan disebabkan oleh pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	%
Belanja Pegawai	5.933.077.007,00	6.041.646.057,00	-1,80
Belanja Barang	13.089.769.936,00	15.438.445.781,00	-15,21
Belanja Modal	1.610.911.000,00	1.152.713.000,00	39,75
Total Belanja	20.633.757.943,00	22.632.804.838,00	-8,83

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.933.077.007,00 dan Rp6.041.646.057,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar - 1,80% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh empat orang pegawai telah memasuki masa pensiun dan 1 orang pegawai yang gaji dan tunjangan nya masih dibayarkan oleh BPPSDMP Kementerian Pertanian.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.933.263.261,00	6.044.006.641,00	-1,83
Jumlah Belanja Kotor	5.933.263.261,00	6.044.006.641,00	-1,83
Pengembalian Belanja Pegawai	-186.254,00	-2.360.584,00	-92,11
Jumlah Belanja	5.933.077.007,00	6.041.646.057,00	-1,80

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp13.089.769.936,00 dan Rp15.438.445.781,00. Realisasi belanja barang TA 2018 mengalami penurunan sebesar -15,21% dari TA 2017. dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kenaikan belanja operasional disebabkan oleh meningkatnya belanja keperluan perkantoran untuk kegiatan operasional balai, penambahan honor operasional satuan kerja untuk honor petugas SAI dan SIMAK BMN, serta peningkatan belanja barang operasional lainnya seperti operasional instalasi perkantoran.

- 2. Peningkatan belanja barang non operasional disebabkan oleh kenaikan harga pada belanja bahan, meningkatnya honor output kegiatan berupa honor panitia dikarenakan adanya sejumlah diklat yang dilaksanakan di luar balai serta bertambahnya belanja barang non operasional lainnya berupa akomodasi untuk diklat yang dilaksanakan di luar balai.
- 3. Menurunnya belanja barang persediaan disebabkan oleh menurunnya jumlah diklat sehingga berdampak pada berkurangnya belanja persediaan konsumsi seperti alat tulis kantor
- 4. Menurunnya belanja jasa berupa penurunan belanja listrik dan telepon, keperluan sewa kendaraan dan belanja jasa profesi akibat dari berkurangnya jumlah diklat.
- 5. Menurunnya belanja pemeliharaan berupa penuruan belanja untuk kegiatan pemeliharaan asrama dikarenakan menurunnya jumlah diklat.
- 6. Menurunnya belanja perjalanan dalam negeri disebabkan oleh menurunnya jumlah perjalanan supervisi, pendampingan, narasumber serta peserta diklat

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.687.327.235,00	1.647.639.520,00	2,41
Belanja Barang Non Operasional	4.663.652.521,00	4.117.712.396,00	13,26
Belanja Barang Persediaan	185.401.500,00	282.377.700,00	-34,34
Belanja Jasa	963.760.669,00	1.223.960.128,00	-21,26
Belanja Pemeliharaan	883.237.510,00	886.851.129,00	-0,41
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.706.390.501,00	7.279.904.908,00	-35,35
Jumlah Belanja Kotor	13.089.769.936,00	15.438.445.781,00	-15,21
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	13.089.769.936,00	15.438.445.781,00	-15,21

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.610.911.000,00 dan Rp1.152.713.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 39,75% dibandingkan TA 2017 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja modal peralatan dan mesin mengalami penurunan dikarenakan pengadaanya tidak sebanyak tahun lalu. Pengadaan tahun ini berupa peralatan asrama dan instalasi, peralatan pengolah data dan informasi serta peralatan dan fasilitas perkantoran.
2. Belanja modal gedung dan bangunan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya berupa penambahan nilai gedung dan bangunan, pembangunan baru, belanja modal perencanaan dan pengawasan serta belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis gedung dan bangunan
3. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya berupa belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis gedung dan bangunan, belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan serta belanja penambahan nilai jalan dan jembatan

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	341.291.000,00	524.423.000,00	-34,92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	846.467.000,00	608.040.000,00	39,21
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	423.153.000,00	20.250.000,00	1.989,64
Jumlah Belanja Kotor	1.610.911.000,00	1.152.713.000,00	39,75
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.610.911.000,00	1.152.713.000,00	39,75

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp341.291.000,00 dan Rp524.423.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 mengalami penurunan sebesar -34,92% dibandingkan TA 2017. Belanja modal tahun ini tidak sebanyak tahun sebelumnya. Belanja tersebut meliputi:

- 1. Pengadaan peralatan asrama dan instalasi berupa oven, sofa, lemari es dan mesin cuci
- 2. Pengadaan peralatan pengolah data dan informasi berupa Komputer PC, Handphone, LCD, Laptop dan Printer Portable
- 3. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa meja rapat, CCTV dan AC

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	341.291.000,00	524.423.000,00	-34,92
Jumlah Belanja Kotor	341.291.000,00	524.423.000,00	-34,92
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	341.291.000,00	524.423.000,00	-34,92

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp846.467.000,00 dan Rp608.040.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 39,21% dibandingkan TA 2017. Belanja modal gedung dan bangunan tahun ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja modal ini meliputi pembangunan gapura, belanja modal untuk panitia pengadaan dan penerima barang/jasa, pengawasan gerai tahap III, pengawasan gapura serta renovasi gerai, perbaikan pagar, renovasi gerai tahap II dan tahap III.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	846.467.000,00	608.040.000,00	39,21
Jumlah Belanja Kotor	846.467.000,00	608.040.000,00	39,21
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	846.467.000,00	608.040.000,00	39,21

B.5.3. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp423.153.000,00 dan Rp20.250.000,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.989,64% dibandingkan TA 2017. Belanja modal tahun ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang meliputi belanja modal untuk panitia pengadaan dan penerima barang/jasa, pengawasan pengaspalan jalan, perbaikan dan pengaspalan jalan.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	423.153.000,00	20.250.000,00	1.989,64
Jumlah Belanja Kotor	423.153.000,00	20.250.000,00	1.989,64
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	423.153.000,00	20.250.000,00	1.989,64

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp89.195.800,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Barang Konsumsi	10.000.000,00	89.195.800,00
Jumlah	10.000.000,00	89.195.800,00

Sisa persediaan tahun ini berupa vandell yang pengadaannya baru dilaksanakan bulan Desember 2018.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp13.890.000.000,00 dan Rp0,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	0,00
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	13.890.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2018	13.890.000.000,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp16.531.177.574,00 dan Rp16.155.172.671,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	16.155.172.671,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	341.291.000,00
Reklasifikasi Masuk	44.250.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-9.536.097,00
Saldo per 31 Desember 2018	16.531.177.574,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-13.460.903.303,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	3.070.274.271,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa

1. Mutasi penambahan berupa pembelian peralatan asrama dan instalasi, peralatan pengolah data dan informasi dan peralatan dan fasilitas perkantoran
2. Mutasi penambahan berupa reklasifikasi masuk atas tangki air dan peralatan umum lainnya. Peralatan tersebut semula tercatat dengan kodefikasi yang salah sebagai gedung dan bangunan berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian untuk kemudian dilakukan koreksi pencatatan dengan surat reklasifikasi dan rincian aset terlampir.
3. Mutasi pengurangan berupa koreksi pencatatan nilai / kuantitas atas setoran kemahalan pengadaan peralatan dan mesin tahun anggaran 2017 dengan bukti setor terlampir

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp27.318.879.615,00 dan Rp19.415.958.280,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	19.415.958.280,00
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	345.948.700,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	61.914.000,00
Reklasifikasi Masuk	166.678.000,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	10.662.770.828,00
Pengembangan Melalui KDP	784.553.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-16.066.085,00
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-2.906.669.108,00
Reklasifikasi Keluar	-185.653.000,00
Koreksi Pencatatan	-1.008.461.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-2.094.000,00
Saldo per 31 Desember 2018	27.318.879.615,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-828.679.627,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	26.490.199.988,00

Mutasi tambah meliputi:

1. Transfer masuk gedung bangunan berupa bangunan gedung kantor lainnya sebesar Rp. 115.710.000,00, bangunan gedung pendidikan dan latihan sebesar Rp.50.968.000,00 dan asrama permanen sebesar Rp.179.270.700,00.

Transfer masuk ini berasal dari Sekjen Kementerian Pertanian yang telah mendapatkan hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BAST terlampir.

2. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP berupa pembangunan gapura
3. Reklasifikasi Masuk berupa bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp.50.968.000,00 dan rumah Negara golongan I Tipe B Permanen sebesar Rp.115.71.000,00. Reklasifikasi masuk ini merupakan pencatatan kembali atas gedung dan bangunan yang telah disesuaikan kode barangnya. Reklasifikasi masuk ini adalah tindak lanjut atas reklasifikasi keluar dengan SK terlampir.
4. Koreksi nilai Tim Penertiban Aset berasal dari hasil revaluasi yang ditetapkan oleh tim penilai dari KPKNL Malang
5. Pengembangan melalui KDP berasal dari renovasi gerai dan perbaikan pagar.

Mutasi kurang meliputi :

1. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas berasal dari koreksi atas kemahalan ruang belajar outdoor, screen house III, screen house depan serta belakang, rumah pupuk dan rumah benih Tahun Anggaran 2017 dengan bukti setor terlampir.
2. Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali berasal dari hasil inventarisasi dan penilaian kembali
3. Reklasifikasi Keluar bangunan gedung kantor lainnya senilai Rp.115.710.000,00 dan bangunan gedung pendidikan dan latihan senilai Rp.50.968.000,00. Reklasifikasi keluar ini dilakukan karena adanya kesalahan pengkodean gedung dan bangunan pada saat proses transfer masuk dari Sekjen Kementerian Pertanian, serta reklasifikasi keluar atas bangunan lainnya senilai Rp18.975.000,00 dikarenakan kesalahan kodefikasi.
4. Koreksi pencatatan tersebut dikarenakan penggabungan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) Barang Milik Negara (BMN) pada saat dilakukan inventarisasi dalam rangka usulan revaluasi.
5. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tetap Lainnya berasal dari bangunan kolam/bak ikan, yang pada waktu inventarisasi, barang tersebut tidak ditemukan.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.480.245.000,00 dan Rp2.070.527.337,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	2.070.527.337,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	150.000.000,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	986.268.922,00
Pengembangan Melalui KDP	273.153.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-961.613.259,00
Reklasifikasi Keluar	-25.275.000,00
Koreksi Pencatatan	-12.816.000,00
Saldo per 31 Desember 2018	2.480.245.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-198.550.366,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	2.281.694.634,00

Mutasi tambah sebagai berikut:

1. Pengembangan Nilai Aset berasal dari perbaikan saluran air.
2. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset berasal dari hasil revaluasi yang ditetapkan oleh tim penilai dari KPKNL Malang
3. Pengembangan Melalui KDP berasal dari pembangunan perbaikan jalan dan pengaspalan jalan

Mutasi kurang sebagai berikut:

1. Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali adalah koreksi untuk menyesuaikan nilai buku hasil inventarisasi dan revaluasi yang ditetapkan oleh Tim KPKNL Malang
2. Rekalsifikasi keluar berasal dari saluran pembawa air baku tertutup yang salah kodefikasi dan telah direklasifikasi masuk sebagai peralatan umum lainnya.
3. Koreksi Pencatatan berasal dari saluran pembuang air cucian baku yang telah dilakukan penggabungan NUP dengan gedung asrama.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp173.451.242,00 dan Rp173.451.242,00. Tidak ada mutasi penambahan/pengurangan pada aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya ini berupa

monografi (buku-buku yang tersimpan di perpustakaan), atlas dan maket/miniatur balai.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	173.451.242,00
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2018	173.451.242,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	173.451.242,00

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-14.488.133.296,00 dan Rp-15.904.572.668,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	16.531.177.574,00	-13.460.903.303,00	3.070.274.271,00
2.	Gedung dan Bangunan	27.318.879.615,00	-828.679.627,00	26.490.199.988,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.480.245.000,00	-198.550.366,00	2.281.694.634,00
4.	Aset Tetap Lainnya	173.451.242,00	0,00	173.451.242,00
Akumulasi Penyusutan		46.503.753.431,00	-14.488.133.296,00	32.015.620.135,00

C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

Tidak ada saldo Piutang Jangka Panjang yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.007.075.200,00 dan Rp1.079.275.053,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	1.079.275.053,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	2.094.000,00
Mutasi Kurang	
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-8.124.853,00
Koreksi Pencatatan	-2.094.000,00
Saldo per 31 Desember 2018	1.007.075.200,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-1.003.848.045,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	3.227.155,00

C.4.2. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-1.003.848.045,00 dan Rp-1.064.521.715,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	1.007.075.200,00	-1.003.848.045,00	3.227.155,00
Akumulasi Penyusutan		1.007.075.200,00	-1.003.848.045,00	3.227.155,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp22.424.012,00 dan Rp17.231.855,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	2.856.593,00	0,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	19.567.419,00	17.231.855,00
Jumlah	22.424.012,00	17.231.855,00

Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp. 2.856.593,00 berasal dari rekapitulasi kekurangan belanja pegawai yang pembayarannya diajukan bulan Januari 2018 dengan bukti SPM terlampir. Sedangkan belanja barang yang masih harus dibayar merupakan belanja listrik dan telepon bulan Desember 2018 yang dibayarkan pada bulan Januari 2019..

C.6. EKUITAS

C.6. EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp45.896.423.278,00 dan Rp21.997.254.145,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp363.781.300,00 dan Rp301.429.800,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	0,00	262.150.000,00	-100,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	323.950.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	0,00	28.611.000,00	-100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	29.288.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.543.300,00	10.668.800,00	-1,18
Jumlah	363.781.300,00	301.429.800,00	20,69

Akun PNBPN mengalami perubahan sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Penjelasan atas perbandingan PNBPN adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Masing-masing Kementerian/Lembaga telah berubah nama akun menjadi Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi. Pendapatan tersebut berasal dari penggunaan sarana dan prasarana balai yang mengalami peningkatan akibat bertambahnya kerjasama dengan pihak eksternal.

- 2. Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan telah berubah nama akun menjadi Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya. Pendapatan tersebut berasal dari hasil pertanian yang mengalami kenaikan hasil panen dibandingkan tahun sebelumnya
- 3. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berupa perolehan atas sewa rumah dinas yang mengalami penurunan karena berkurangnya jumlah pegawai yang menempati rumah dinas.

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.935.933.600,00 dan Rp5.935.933.600,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	4.110.950.840,00	4.261.926.400,00	-3,54
Beban Pembulatan Gaji PNS	57.100,00	57.409,00	-0,54
Beban Tunj. Anak PNS	100.087.792,00	96.207.202,00	4,03
Beban Tunj. Beras PNS	229.571.400,00	241.158.600,00	-4,80
Beban Tunj. Fungsional PNS	295.280.000,00	260.955.000,00	13,15
Beban Tunj. PPh PNS	18.040.548,00	17.230.346,00	4,70
Beban Tunj. Struktural PNS	109.755.000,00	115.845.000,00	-5,26
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	347.100.920,00	336.951.100,00	3,01
Beban Tunjangan Umum PNS	125.955.000,00	121.700.000,00	3,50
Beban Uang Makan PNS	599.135.000,00	589.615.000,00	1,61
Jumlah	5.935.933.600,00	6.041.646.057,00	-1,75

Penjelasan atas perbandingan beban pegawai sebagai berikut:

1. Beban Gaji Pokok PNS mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan ada empat orang pegawai yang telah pensiun dan satu orang pegawai yang gaji dan tunjangannya masih dibayarkan oleh BPPSDMP Kementerian Pertanian.
2. Beban Pembulatan Gaji PNS mengalami penurunan dikarenakan hasil penggenapan dari aplikasi gaji.
3. Beban Tunjangan Anak PNS mengalami peningkatan dikarenakan penambahan jumlah anak PNS
4. Beban Tunjangan Beras PNS mengalami penurunan karena penurunan jumlah pegawai akibat yang bersangkutan telah memasuki masa pensiun.
5. Beban Tunjangan Fungsional PNS mengalami kenaikan disebabkan pengaktifan kembali tunjangan fungsional widyaiswara yang telah menyelesaikan tugas belajarnya.
6. Beban Tunjangan PPh PNS mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya sebagian pegawai yang mengalami kenaikan pangkat dan berimbas kepada kenaikan tunjangan PPhnya.
7. Beban Tunjangan Struktural PNS mengalami penurunan akibat dari salah seorang pejabat struktural eselon III yang pembayaran gajinya masih dibayarkan BPPSDMP Kementerian Pertanian
8. Beban Tunjangan Suami/Istri PNS mengalami kenaikan akibat kenaikan gaji pokok beberapa orang pegawai yang berimbas pada kenaikan tunjangan suami/istri.
9. Beban Tunjangan Umum PNS mengalami kenaikan akibat penambahan satu orang CPNS yang telah diangkat menjadi PNS.
10. Beban Uang Makan PNS mengalami kenaikan akibat dari perbedaan jumlah hari kerja PNS di Balai.

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp264.597.300,00 dan Rp243.598.140,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan konsumsi	264.597.300,00	243.598.140,00	8,62
Jumlah	264.597.300,00	243.598.140,00	8,62

Beban persediaan konsumsi mengalami peningkatan dikarenakan terdapat persediaan konsumsi tahun 2017 yang dialokasikan pada tahun ini diantaranya Stopmap Balai, Leafleat, agenda dan buletin.

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.317.075.989,00 dan Rp6.991.667.279,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Bahan	3.867.677.521,00	3.610.354.196,00	7,13
Beban Barang Non Operasional Lainnya	419.725.000,00	181.608.200,00	131,12
Beban Barang Operasional Lainnya	492.791.730,00	529.115.913,00	-6,87
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	106.600.000,00	104.520.000,00	1,99
Beban Honor Output Kegiatan	376.250.000,00	325.750.000,00	15,50
Beban Jasa Lainnya	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00
Beban Jasa Profesi	604.300.000,00	700.450.000,00	-13,73
Beban Keperluan Perkantoran	1.085.056.805,00	1.011.137.347,00	7,31
Beban Langganan Listrik	215.432.026,00	183.560.246,00	17,36
Beban Langganan Telepon	13.164.207,00	21.305.117,00	-38,21
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.878.700,00	2.866.260,00	0,43
Beban Sewa	115.600.000,00	303.400.000,00	-61,90
Jumlah	7.317.075.989,00	6.991.667.279,00	4,65

Penjelasan atas beban barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Beban bahan mengalami kenaikan dikarenakan meningkatnya harga bahan untuk keperluan diklat, misalnya adalah harga fotocopy.
2. Beban barang non operasional lainnya mengalami kenaikan karena pada tahun ini terdapat beberapa diklat yang dilaksanakan di luar balai, sehingga menambah biaya akomodasi
3. Beban barang operasional lainnya mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya anggaran operasional lahan praktek dan operasional instalasi laboratorium dan minyak atsiri dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk operasional instalasi perkantoran realisasinya lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
4. Beban Honor operasional satuan kerja mengalami kenaikan disebabkan adanya penambahn honor untuk petugas SIMAK dan SAI
5. Beban Honor Output Kegiatan mengalami kenaikan disebabkan adanya honor panitia untuk diklat tematik yang dilaksanakan di luar balai.
6. Beban jasa lainnya jumlahnya tetap jika dibandingkan tahun lalu. Beban ini berupa pengeluaran untuk kegiatan survilance ISO.
7. Beban jasa profesi mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya jumlah diklat yang berdampak pada berkurangnya honor narasumber dan praktisi yang dikeluarkan.
8. Beban Keperluan Perkantoran mengalami kenaikan sehubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan sehari-hari perkantoran, langganan internet, pakaian pegawai dan satpam serta honor untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti.
9. Beban langganan listrik mengalami kenaikan sehubungan dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).
10. Beban Langganan Telepon mengalami penurunan karena meningkatnya penggunaan internet sebagai sarana komunikasi
11. Beban Pengiriman Surat Dinas mengalami kenaikan sehubungan dengan kenaikan biaya pengiriman pos.
12. Beban sewa mengalami penurunan karena berkurangnya sewa kendaraan yang merupakan imbas dari menurunnya jumlah diklat.

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp883.238.010,00 dan

Rp886.851.129,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	368.810.000,00	504.942.000,00	-26,96
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	469.775.010,00	381.909.129,00	23,01
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	44.653.000,00	0,00	0,00
Jumlah	883.238.010,00	886.851.129,00	-0,41

Penjelasan mengenai beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

1. Beban pemeliharaan gedung dan bangunan mengalami penurunan karena jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara lebih sedikit dibandingkan tahun lalu.
2. Beban pemeliharaan peralatan dan mesin mengalami kenaikan karena bertambahnya jumlah peralatan dan mesin balai, sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih besar.
3. Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan mengalami kenaikan karena pada tahun sebelumnya kegiatan operasional asrama pembiayaannya diposkan sebagai belanja persediaan konsumsi, sedangkan untuk tahun 2018 ini telah dilakukan pengelompokan sebagai beban persediaan bahan untuk pemeliharaan.

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.706.390.501,00 dan Rp7.279.904.908,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	2.697.723.942,00	2.039.262.013,00	32,29
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	62.980.000,00	1.838.041.623,00	-96,57
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.945.686.559,00	3.402.601.272,00	-42,82
Jumlah	4.706.390.501,00	7.279.904.908,00	-35,35

Penjelasan mengenai perbandingan beban perjalanan dinas adalah sebagai berikut:

1. Beban Perjalanan biasa mengalami kenaikan dikarenakan adanya program Kementerian Pertanian berupa pengawalan dan pendampingan UPSUS, SERGAP P4S berprestasi serta pengawalan dan pendampingan Alsintan, yang biaya perjalanan dinasnya jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota mengalami penurunan karena menurunnya jumlah diklat yang diselenggarakan balai sehingga berdampak pada menurunnya perjalanan narasumber, praktisi dan fasilitator.
3. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota mengalami penurunan karena menurunnya jumlah diklat yang diselenggarakan balai sehingga berdampak pada menurunnya perjalanan pendamping, petugas lokal dan peserta.

D.7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.925.368.175,00 dan Rp2.587.055.269,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.036.658.047,00	588.359.294,00	76,19
Beban Penyusutan Irigasi	43.466.044,00	32.758.170,00	32,69
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	128.054.136,00	22.491.584,00	469,34
Beban Penyusutan Jaringan	15.355.388,00	11.605.388,00	32,31
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.401.330,00	5.420.210,00	-37,25
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.698.433.230,00	1.926.420.623,00	-11,83
Jumlah	2.925.368.175,00	2.587.055.269,00	13,08

Perbandingan beban penyusutan dan amortisasi adalah sebagai berikut:

1. Beban penyusutan gedung dan bangunan bertambah karena penambahan bangunan berupa gapura, renovasi gerai dan koreksi bertambah hasil inventarisasi dan penilaian kembali
2. Beban penyusutan irigasi bertambah karena hasil koreksi bertambah dampak dari inventarisasi dan penilaian kembali.
3. Beban penyusutan jalan dan jembatan bertambah dikarenakan penambahan perbaikan jalan, pengaspalan serta koreksi bertambah dampak dari inventarisasi dan penilaian kembali.
4. Beban penyusutan jaringan bertambah karena adanya perbaikan saluran air dan hasil koreksi bertambah dampak dari inventarisasi dan penilaian kembali.
5. Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah berkurang karena menurunnya jumlah aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.
6. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin mengalami penurunan karena menurunnya nilai peralatan dan mesin dikarenakan telah mengalami masa penyusutan.

D.8. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi

entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-9.278.077,00	-121.346.369,00	-92,35
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	-299.650,00	-100,00
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	0,00	1.000.000,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	500,00	37.279.390,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	555.000,00	-100,00
Jumlah	-9.277.577,00	-82.811.629,00	-88,80

Penjelasan atas perbandingan pos surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah sebagai berikut:

1. Beban kerugian pelepasan aset mengalami penurunan dikarenakan jumlah aset yang dihapuskan/dikoreksi lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya
2. Beban penyesuaian nilai persediaan dan Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara pada tahun ini tidak ada.
3. Tidak ada pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) bendahara
4. Pendapatan penyesuaian nilai persediaan berkurang drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan dikategorikan wajar karena nilainya yang sedikit.
5. Tidak ada penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu karena telah dilakukan koreksi aset tetap non revaluasi.
6. Tidak ada penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp21.997.254.145,00 dan Rp23.476.278.031,00.

E.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-21.678.099.852,00 dan Rp-23.812.104.611,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.103.864.798,00 dan Rp0,00.

E.4.1. KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-545.174.952,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	482.413.141,00
Akumulasi Penyusutan Irigasi	26.556.600,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-32.867.693,00
Gedung dan Bangunan	-1.043.502.085,00
Irigasi	-38.091.000,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	25.602.182,00
Peralatan dan Mesin	34.713.903,00
Jumlah	-545.174.952,00

E.4.2. PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.4.3. SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.649.039.750,00 dan Rp0,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Gedung dan Bangunan	10.662.770.828,00
Jalan, Jembatan dan Irigasi	986.268.922,00
Jumlah	11.649.039.750,00

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp34.473.404.187,00 dan Rp22.333.080.725,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	20.633.757.943,00
Diterima dari Entitas Lain	-389.383.482,00
Transfer Masuk	14.229.029.726,00
Jumlah	34.473.404.187,00

E.5.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2018 saldo DDEL adalah sebesar Rp-389.383.482,00 sedangkan DKEL sebesar Rp20.633.757.943,00.

E.5.2. TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp14.229.029.726,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2018.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Tanah	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	13.890.000.000,00
2.	Gedung dan Bangunan	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	345.948.700,00
3.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	-6.918.974,00
Jumlah			14.229.029.726,00

E.6. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp45.896.423.278,00 dan Rp21.997.254.145,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN BPK

Tidak ada Temuan dan Tindak Lanjut atas Temuan BPK

F.3 REKENING PEMERINTAH

- Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah :

No.	Nomor Rekening	Atas Nama Rekening	Bank	Saldo Rekening
1.	144-00-1174792-7	BPG 032 BBPP Ketindan (239654)	Bank Mandiri KCP Lawang	Rp. 0
2.	144-00-1523463-3	BPN 032 BBPP KETINDAN (239654)	Bank Mandiri KCP Lawang	Rp. 0

F.4 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 01/Kpts/KU.010/01/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Tanggal 2 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. drh. Kresno Suharto,MP
Bendahara Pengeluaran : Lilik Nuryani, SAP
Bendahara Penerimaan : Yuni Astuti

Terdapat pergantian pejabat penandatanganan SPM dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 11/SK/OT.130/I.14/01/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Bali Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Tanggal 2 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Nurul Qomariyah, S.Sos,M.Si

Pejabat Penandatanganan SPM : Dra. Tri Agustin W.

2. Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SK/OT.130/I.14/09/2018

01/SK/OT.130/I.14/09/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Tanggal 3 September 2018 adalah sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	: Nurul Qomariyah, S.Sos,M.Si
Pejabat Penandatanganan SPM	: Ema Ernawati, SE

F.5 TRANSFER MASUK, TANAH GEDUNG DAN BANGUNAN

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan menerima transfer masuk dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian berupa tanah, gedung dan bangunan senilai Rp.14.235.948.700,00. Nilai transfer masuk yang dibaca pada aplikasi SAIBA sebesar Rp.14.229.029.377,00. Selisih sebesar Rp.6.918.974,00 tersebut berasal dari penyusutan gedung dan bangunan.

F.6 SETORAN KEMAHALAN TAHUN 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, terdapat setoran belanja modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.25.602.182,00. Pada tanggal penyetoran di bulan Agustus 2018, setoran ini dicatat sebagai pengembalian belanja Tahun Anggaran 2018. Namun kemudian telah dikoreksi pada bulan September sebagai penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu dengan bukti setor dan bukti koreksi terlampir.

F.7 REVISI DIPA

KRONOLOGIS REVISI I ANGGARAN TAHUN 2018

1. Pemotongan anggaran sebesar Rp.478.000.000,00 yang diambilkan dari output Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian.

KRONOLOGIS REVISI II ANGGARAN TAHUN 2018

1. Optimalisasi anggaran Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian sebesar Rp. 743.573.000,00 yang meliputi:
 - Optimalisasi pelatihan fungsional RIHP, sesuai justifikasi dari penyelenggara diklat
 - Optimalisasi pelatihan tematik yang semula 7 hari menjadi 5 hari
 - Perjalanan supervisi untuk Diklat Tematik 1 (satu) OP per angkatan

- Perubahan jumlah angkatan dalam tiap komoditas sesuai CPCL dengan justifikasi dari penyelenggara diklat
2. Penggunaan anggaran optimalisasi antara lain:
- Penambahan anggaran perjalanan koordinasi pada administrasi kegiatan
 - Penambahan anggaran belanja bahan pada administrasi kegiatan
 - Penambahan anggaran Sistem Informasi, Publikasi dan Promosi
 - Komputer PC untuk Rumah Tangga dan Kepegawaian
 - Renovasi Gerai
 - Perbaikan Jalan
 - Penambahan anggaran eksploitasi roda empat
 - Penambahan anggaran operasional lahan, operasional laboratorium dan operasional perkantoran
 - Penambahan anggaran langganan internet
 - Honor SAI dan BMN

KRONOLOGIS REVISI III ANGGARAN TAHUN 2018

1. Penambahan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00 yang digunakan untuk pengawalan dan pendampingan UPSUS ALSINTAN

KRONOLOGIS REVISI IV ANGGARAN TAHUN 2018

1. Refocusing anggaran sebesar Rp.360.407.000,00 yang digunakan untuk penambahan Tunjangan Kinerja, yang diambilkan dari:
 - Pelatihan Teknis Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Pertanian sebesar Rp. 64.905.000,00
 - Pelatihan Pengolahan Hasil Tanaman Obat sebesar Rp.64.906.000,00
 - Pemenuhan sarana dan prasarana P4S sebesar Rp.30.000.000,00
 - Gaji dan tunjangan sebesar Rp.200.596.000,00

KRONOLOGIS REVISI V ANGGARAN TAHUN 2018

1. Optimalisasi anggaran Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian output 001 sebesar Rp. 904.145.000,-
2. Penggunaan anggaran optimalisasi antara lain:
 - Penambahan anggaran output 006 Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan yaitu Administrasi Kegiatan, Evaluasi Dampak, Sistem Informasi, Publikasi dan Promosi, Pengawalan dan pendampingan UPSUS
 - Penambahan output 951 Layanan Internal (Overhead) yaitu Pengadaan peralatan pengolah data dan informasi, Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran, Pengadaan Gedung dan Bangunan.

- Penambahan output 994 Layanan Perkantoran yaitu Jaringan Kantor

KRONOLOGIS REVISI VI ANGGARAN TAHUN 2018

1. Optimalisasi anggaran Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian output 001 sebesar Rp. 728.710.000,-
2. Penggunaan anggaran optimalisasi antara lain
 - Penambahan anggaran output 006 Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan yaitu Administrasi Kegiatan, Sistem Informasi, Publikasi dan Promosi, Pengawasan dan pendampingan UPSUS, Jejaring Kerjasama, Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara dan Penyusunan Rencana Kerja, Kinerja, Kegiatan dan Anggaran
 - Penambahan output 951 Layanan Internal (Overhead) yaitu Pengadaan peralatan pengolah data dan informasi, Pengadaan Gedung dan Bangunan (Renovasi Gerai Tahap III, Pembangunan Gapura dan Pengaspalan Jalan).
 - Penambahan output 994 Layanan Perkantoran yaitu Operasional Perkantoran

KRONOLOGIS REVISI VII ANGGARAN TAHUN 2018

1. Optimalisasi anggaran Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian output 001 sebesar Rp. 591.948.000,-
2. Penggunaan anggaran optimalisasi antara lain
 - Penambahan target output 001 Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian (Bimtek Alsintan di Prop. Bali, Bimtek Pengolahan Hasil hortikultura untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani menjadi 3 Angkatan)
 - Penambahan anggaran output 006 Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan yaitu Administrasi Kegiatan, Sistem Informasi, Publikasi dan Promosi, Pengawasan dan pendampingan UPSUS, Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara dan Penyusunan Program dalam rangka Rancang Bangun Kegiatan 2019
 - Penambahan output 951 Layanan Internal (Overhead) yaitu Pengadaan peralatan pengolah data dan informasi
 - Penambahan output 994 Layanan Perkantoran yaitu Operasional Perkantoran, Pemeliharaan Komputer/Notebook, Pakaian seragam satpam.
3. Perubahan akun Perbaikan saluran air yang semula 533111 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan) menjadi 534161 (Belanja Penambahan Nilai Jaringan)
4. Perubahan akun pembangunan gapura yang semula 533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan) menjadi 533111 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan)

5. Perubahan akun perbaikan jalan tahap II yang semula 534141 (Belanja Penambahan Nilai jalan dan Jembatan menjadi 533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan)

KRONOLOGIS REVISI VII POK 4 ANGGARAN TAHUN 2018

Pergeseran anggaran antar output antara lain

1. Bimtek Pengolahan Hasil Hortikultura untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani
Pergeseran anggaran konsumsi petugas sebesar Rp. 17.400.000,- ke perjalanan petugas, Pergantian akun perjalanan petugas yang semula 524119 (Perjalanan Paket Meeting Luar Kota) menjadi 524111 (Perjalanan Biasa)
2. Penyusunan Rencana Kerja, Kinerja, Kegiatan dan Anggaran
Pergeseran anggaran perjalanan sebesar Rp. 8.960.000,- ke perjalanan Sistem Manajemen Mutu
3. Sistem Informasi, Publikasi dan Promosi
Kekurangan anggaran belanja bahan sebesar Rp. 7.500.000,- yang diambilkan dari Belanja barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
4. Operasional Lahan Praktek diambil sebesar Rp. 3.500.000,- dan Operasional Instalasi Laboratorium dan Minyak Atsiri diambil sebesar Rp. 3.500.000,- di geser ke Pemeliharaan Genset
5. Penambahan anggaran Honor Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti sebesar Rp. 21.500.000,- yang diambilkan dari optimalisasi listrik, telepon, koresponden kedinasan.

KRONOLOGIS REVISI VIII ANGGARAN TAHUN 2018

Pergeseran anggaran antar output antara lain

1. Bimtek Pengolahan Hasil Hortikultura untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani
Pergeseran anggaran konsumsi petugas sebesar Rp. 17.400.000,- ke perjalanan petugas, Pergantian akun perjalanan petugas yang semula 524119 (Perjalanan Paket Meeting Luar Kota) menjadi 524111 (Perjalanan Biasa)
2. Penyusunan Rencana Kerja, Kinerja, Kegiatan dan Anggaran
Pergeseran anggaran perjalanan sebesar Rp. 8.960.000,- ke perjalanan Sistem Manajemen Mutu
3. Sistem Informasi, Publikasi dan Promosi

Kekurangan anggaran belanja bahan sebesar Rp. 7.500.000,- yang diambilkan dari Belanja barang untuk Persediaan Barang Konsumsi

4. Operasional Lahan Praktek diambil sebesar Rp. 3.500.000,- dan Operasional Instalasi Laboratorium dan Minyak Atsiri diambil sebesar Rp. 3.500.000,- di geser ke Pemeliharaan Genset
5. Penambahan anggaran Honor Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti sebesar Rp. 21.500.000,- yang diambilkan dari optimalisasi listrik, telepon, koresponden kedinasan.

REVISI IX ANGGARAN TAHUN 2018

Revisi dalam hal pemutakhiran data yaitu revisi anggaran pada KPA sehingga mengubah POK dan mengubah arsip data komputer RKA-K/L (adanya pergeseran anggaran dalam satu output) pada Kementerian Keuangan.